KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

			FINAL/ HDAK FINAL				
KEMENTERIAN KEUANGAN RI		H.1 NOMOR : 1 0 0 0 0 0 0 0 8			H.4 X Final		
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.2 X Pembetulan Ke-	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			H.5 Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : [15] [6] [6] [7] [6] [7] [2] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : HARI JUMADI							
B. PPh PASAL 2	1 YANG DIPOTONG						
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
2	21-402-01	1.090.000	1.090.000	0	5	54.500	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen .							
Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 1 0 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor: Tanggal dd yyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C IDENTITAS DEMOTONO DA IAV							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK C.1 NPWP Instansi Pemerintah 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0							
	ınsi Pemerintah :		RAH ATMA HUSADA MAHAK		IMANTAN	TIMUR	
C.3 ID Subunit	Organisasi :		$\overline{\Box}$			<u> </u>	
C.4 Tanggal	:	0 9 dd 0 2 mm	2 0 2 2 уууу			_	
C.5 Nama Pena	ndatangan :	HARI JUMADI					
C.6 Pernyataan							
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diper	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	r mengatur bahwa dok	umen ini tela	ah ditandatangani secara	

XJW8CC48